

Upaya Muhammadiyah Menggali Potensi Pemulung TPST Piyungan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Muhammadiyah's Efforts to Explore the Potential of Piyungan TPST Scavengers Through Community Empowerment

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid¹, Verryanto Eko Priyono Putra², Lies Wuryanita
Adriyani³ dan Nuril Endi Rahman⁴

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Madiun, Indonesia

* Correspondence e-mail; rifaatfarid@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/11/19; Revised: 2024/12/08; Accepted: 2024/12/28

Abstract

This research discusses Muhammadiyah's efforts regarding the scavenger empowerment program at the Piyungan TPST. The objectives of this research are (1) To find out the problems faced by the Community Empowerment Council (MPM) in carrying out community empowerment programs at Piyungan TPST. (2) Knowing the impact of the community empowerment program carried out by MPM at Piyungan TPST. This research uses descriptive qualitative methods. The results of the research show (1) The problems faced by MPM originate from the surrounding community who do not know the empowerment program in detail. (2) The impact that occurs in the community is to unite in one community which was previously scattered into several groups of collectors and better understand their own potential through empowerment activities

Keywords

Muhammadiyah; Partisipation; Potential; Role; Scavenger.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan timbunan sampah juga disebabkan oleh peningkatan aktivitas serta belum semua pihak mempunyai kemampuan maupun kemauan dalam mengelola sampah. Sementara itu, peningkatan timbunan sampah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pembuangan sampah yang memadai sehingga menyebabkan kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Yogyakarta semakin menurun. (Ardila, 2017)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tiga tempat pembuangan akhir, yakni TPST Piyungan, TPST Banyuroto dan TPST Baleharjo. TPST Piyungan menampung jumlah sampah terbesar karena merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kondisi TPA Piyungan kian lama kian memprihatinkan karena kapasitasnya sebagai lokasi penampungan akhir sampah sudah mengalami penurunan.

TPST Piyungan didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan luas lahan 12,5 Ha kemudian diperluas menjadi 14 Ha. TPST Piyungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 s/d 1999. Namun, dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2000 pengelolaan TPST Piyungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama Sekretariat Bersama Kartamantul. (Ardila, 2017)

TPST Piyungan terletak pada cekungan dengan kemiringan bervariasi, curam, dan mendatar. Lokasi tempat TPST Piyungan berdiri terbentuk atas tanah ledok dengan jurang yang cukup dalam sebesar 40 m. Kedalaman airtanah berkisar antara 2-5 meter dengan lapisan tanah mengandung gamping. Luas keseluruhan TPST Piyungan sebesar 12,5 Ha dengan kapasitas volume sampah 2.7 juta m³. Saat ini TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan akhir regional dari tiga Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sampah yang masuk ke TPST Piyungan berkisar antara 400-500 ton/hari dengan sistem pengelolaan sampah control landfill.

Mencermati hal yang demikian, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia telah hadir secara konsisten serta mempunyai andil dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat, seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial maupun lainnya. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000, di dalam struktur Muhammadiyah perlu terdapat sebuah Lembaga yang menangani

pemberdayaan masyarakat dengan nama Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN), kemudian berdasarkan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005 menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Perubahan ini sebagai upaya menerapkan dan mengangkat kembali prinsip kemanfaatan bagi umat yang telah menjadi landasan gerak Muhammadiyah yang pertama kali dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan. (Nashir, 2010) MPM ini dapat berdiri hingga struktur tingkat Kabupaten/Kota atau disebut 'Daerah' dalam struktur organisasi Muhammadiyah.

Perubahan ini sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dalam bentuk gerakan sosial baru (new social movement) yang lebih relevan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip dari gerakan Muhammadiyah awal yang hendak dibangkitkan kembali pasca Mukhtamar 2005 di Malang itu terutama adalah humanisme tanpa memandang latar belakang agama, ras serta golongan. Muhammadiyah akan menolong sesama manusia tidak membedakan suku, ras, golongan maupun agama. Prinsip ini mengacu pada berbagai bukti-bukti pendukung sejarah seperti Al Manak Muhammadiyah 1929 yang menyebutkan bahwa pertolongan yang dilakukan oleh Muhammadiyah semata-mata karena memenuhi kewajiban atas agama Islam terhadap segala bangsa. (Muhammadiyah, 2017)

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dengan perkembangan teknologi serta zaman yang sangat pesat masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, oleh karena itu Muhammadiyah hadir dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) maupun melakukan kolaborasi dengan unsur lainnya. Upaya pemberdayaan ini menasar pada kaum marjinal, maupun kaum miskin, maupun kelompok masyarakat lainnya. Menurut Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 27 tahun 2015 juga menyebutkan jika pemulung di TPST Piyungan ini menjadi bagian kelompok marjinal dalam struktural masyarakat, hal ini disebabkan karena pemulung mencari nafkah pada tempat sampah atau pada barang-barang yang telah dibuang oleh masyarakat, sehingga kemudian muncul stigma di masyarakat bahwa orang yang mencari nafkah dari sampah identik dengan pekerjaan yang "kotor." (Muhammadiyah, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menekankan pada eksplorasi mendalam untuk menemukan gambaran yang jelas (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan serta kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di

Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sumber data yang menjadi fokus penelitian terdiri dari pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maupun dari pemulung. Sumber data primer yang berupa hasil dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan bantuan telepon seluler untuk merekam suara dan mendokumentasikan gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui metode triangulasi sumber dengan menggunakan bahan referensi lain sebagai pembanding.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti dampak perubahan sosial yang terjadi karena adanya program pemberdayaan masyarakat. Kotler mengemukakan bahwa upaya perubahan sosial yang terarah dalam pemberdayaan komunitas tidak terlepas kaitannya dengan masalah sosial dan aksi sosial. Hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Adanya masalah sosial dapat menimbulkan perubahan sosial dapat menimbulkan perubahan sosial dan untuk mengarahkannya diperlukan aksi sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah melalui MPM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menggunakan model pendampingan berkala, yaitu fasilitator sebagai garda terdepan program pemberdayaan bersama pengurus MPM datang secara berkala ke warga TPST Piyungan melalui komunitas pemulung Mardiko (Makaryo Adhi Ngayogyakarta) dibentuk sebagai upaya intervensi untuk menyatukan pemulung yang sebelum MPM datang masih terpencar mengikuti pengepul masing-masing.

Intervensi itu dilakukan setelah melihat keadaan kelompok pemulung di TPST Piyungan yang memprihatinkan dan sering dianggap sebelah mata, dan didorong oleh semangat merealisasikan model dakwah pencerahan berbasis komunitas, yang salah satu bentuknya adalah dakwah bagi kalangan kelompok marginal. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah bergerak mengintervensi komunitas marginal tersebut dengan fokus memperbaiki aspek kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, bahkan spiritual bagi para pemulung di TPST Piyungan (Ramdani, 2018). Usaha ini telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Upaya yang berbasis pada kekuatan, (strengths based approach) juga dilakukan

oleh MPM terutama fokus pada kekuatan berorganisasi pada pemulung. Awal tahun 2015, MPM terlibat aktif untuk menyatukan pemulung di bawah satu wadah organisasi karena sebelumnya, pemulung masih mengikuti pengepungnya masing-masing, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sanupal, anggota divisi organisasi MPM.

“Pertama kali yang kita lakukan pasca masuk ke TPST, adalah memikirkan bagaimana caranya agar pemulung ini bersatu dalam satu wadah karena pemulung sebelumnya masih terpecah-pecah mengikuti pengepungnya masing-masing. Dan kemudian disepakati nama komunitas pemulungnya sebagai komunitas pemulung *Mardiko (Makaryo Adhi Ngayogyakarta)*” (Wawancara Sanupal, anggota divisi organisasi MPM, pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB)

Setelah pemulung bersatu dalam satu wadah, maka pada awal berdirinya *Mardiko*, pihak MPM dan *Mardiko* sempat melakukan audiensi dengan pengurus TPST untuk memperkenalkan diri untuk kembali meyakinkan pengurus TPST bahwa yang dilakukan oleh *Mardiko* ini tidak mengganggu kinerja pemungutan sampah karena sempat ada kekhawatiran dari pengurus TPST seperti itu dan sebagai upaya untuk meminta bantuan kantor atau sekretariat yang bisa untuk digunakan dalam kegiatan organisasi. Keberadaan komunitas pemulung ini menjadi pengikat antar satu sama lainnya, dan tidak ada paksaan untuk bergabung.

“Kalau di sosiologi itu kan orang berkumpul itu karena guyub tok, ada yang terikat lalu berkumpul itu karena sebuah aturan yang ketat seperti perusahaan, seperti kampus dan sebagainya, dari apa punishment, kalau paguyuban kan kalau seneng ya gabung, arepe ngewehi punishment ya piye, ya paling mung diomongi ya wes,” (Wawancara dengan Maryono, ketua *Mardiko*, pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

Upaya Muhammadiyah Menggali Potensi Pemulung

Kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan sejak 2016 hingga kini dan setelah melalui identifikasi masalah, akhirnya kegiatan ini berfokus pada pembenahan dan peningkatan kesehatan pemulung melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pelaksanaan program MPM ini selain melibatkan unsur akademisi, juga melibatkan partisipasi dari masyarakat sekitar. Kegiatan PHBS ini diiringi dengan pengecekan kesehatan gratis serta penguatan internal *Mardiko* serta pembangunan fasilitas sarana akses air bersih dan bak cuci tangan padasan *Mardiko* di dekat tumpukan sampah TPST Piyungan. Pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan model kemandirian seperti melalui komunitas pemulung ini. (Febriyanti, 2023) Muhammadiyah dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebutuhan pengembangan, seperti pelatihan dan pendidikan.

Alur yang dilakukan MPM adalah mengajak serta melibatkan masyarakat secara aktif dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan pertemuan serta dialog interaktif. Dari dialog ini membuat pemulung dapat memahami tujuan pemberdayaan yang dilakukan serta dapat mencermati dan membuat perencanaan ke depannya apabila TPST Piyungan akan ditutup secara permanen, dengan ditutupnya TPST secara permanen ini maka secara tidak langsung dapat menyebabkan adanya ancaman terhadap pekerjaan pemulung sebab tidak akan lagi dapat mengais rezeki dengan memulung sampah di TPST Piyungan. Dampak langsung yang dirasakan paling utama berkaitan dengan hilangnya pekerjaan sebagai sumber penghasilan harian pemulung Mardiko. Kondisi ini akan dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi yaitu hilangnya pekerjaan dan penghasilan. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya upaya transisi pekerjaan yang berkelanjutan bagi komunitas Mardiko. Kebutuhan pemulung ini berdasarkan hasil identifikasi masalah dan disesuaikan dengan tujuan pemberdayaan bagi pemulung yang tercantum pada Buku Profil Mardiko berikut ini.

Tabel 1. Tujuan dan Kegiatan Utama Program Pemberdayaan

Sumber: Buku Profil Mardiko

No.	Tujuan Adanya Pemberdayaan Bagi Pemulung	Kegiatan Utama
1	Meningkatkan kesejahteraan anggota Mardiko maupun masyarakat sekitar TPST Piyungan	Penyadaran bagi anggota Mardiko dan masyarakat sekitar TPST Piyungan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat
2	Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan penghasilan anggota Mardiko (yang cenderung miskin dan terpinggirkan)
3	Meningkatkan taraf kemandirian ekonomi komunitas Mardiko dan masyarakat	Membangun jaringan kerja sama ke

	TPST Piyungan melalui pengembangan unit usaha pengolahan dan pemilahan sampah	berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Mardiko dan masyarakat sekitar TPST Piyungan
4	Meningkatkan kesadaran pendidikan anggota Mardiko dan masyarakat sekitar TPST Piyungan	Advokasi kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik non akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar TPST Piyungan
5	Meningkatkan kapasitas dan daya saing anggota Mardiko dan masyarakat sekitar TPST Piyungan	Pengembangan unit usaha pengolahan sampah secara lebih berkelanjutan

Merujuk pada tabel di atas maka MPM selanjutnya banyak melakukan kegiatan pemberdayaan bagi pemulung, seperti kajian keagamaan, pelatihan dan edukasi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), pemeriksaan kesehatan maupun pendampingan dan pelatihan ekonomi yang dapat menggali potensi pada diri pemulung maupun komunitas Mardiko pada khususnya. Adapun lebih lanjut, beberapa indikator keberhasilan yang bisa dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti jumlah warga penerima manfaat yang tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan, frekuensi kehadiran tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan maupun intensitas kegiatan aktor pemberdayaan dalam pengendalian masalah. (Hamid, 2018; Endah, 2021). Saat pemeriksaan kesehatan ataupun kegiatan lainnya, warga pasti antusias untuk datang dengan minimal jumlah yang hadir bisa sekitar paling sedikit 200an warga. (Wawancara Sanupal, anggota divisi Pemberdayaan Komunitas MPM, tanggal 10 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB)

“Dampaknya ada banyak sekali, contoh dulunya pemulung tidak bisa mengoperasikan IT atau komputer lalu dilatih oleh MPM untuk mengoperasikan IT sekarang kami sudah bisa walaupun cuma sedikit. Dulu tidak bisa membaca Al-Qur’an,

dengan dilatih membaca Iqro' sekarang sudah bisa membaca Iqro'. Dulu tidak ada bayangan menjadi pengusaha, sekarang selain pemulung juga mempunyai sambilan sebagai pengolah sampah, lalu soal kesehatan, MPM bekerja sama dengan RS PKU Muhammadiyah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekarang yang dulu banyak terserang penyakit diare, muntaber dan gatal-gatal Alhamdulillah sekarang sudah berkurang sama sekali. Intinya sangat bermanfaat sekali MPM datang kesini, Mas." (Wawancara dengan Maryono, ketua Mardiko, pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

Selain itu dampak yang terjadi di TPST Piyungan antara lain meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat pada diri pemulung dengan adanya bak cuci tangan/padasan Mardiko, pemeriksaan kesehatan secara rutin maupun pengajian Ahad pagi. Dampak lainnya adalah solidaritas antar pemulung juga meningkat karena sudah menjadi satu wadah bernama Mardiko. Perhatian Pemerintah Daerah maupun unsur swasta ke pemulung di TPST Piyungan juga cenderung meningkat karena setiap kegiatan Mardiko sering kali diliput oleh media cetak maupun media elektronik. Komunitas Mardiko juga aktif dalam menyuarakan persoalan di TPST Piyungan, seperti kondisi yang sudah penuh, jalan akses yang tidak merata dan juga keberadaan kolam penampungan air sampah yang bocor sehingga menyebabkan air mengalir ke sawah. (Wawancara dengan Maryono, anggota Mardiko, pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

Selama adanya pendampingan dari MPM, pemulung banyak mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan bagaimana cara berorganisasi yang baik, mendapatkan fasilitas-fasilitas pelatihan dan pengajian rutin di MPM. Selain itu komunitas pemulung berani mengeluarkan suara terhadap hak-hak komunitas pemulung atau warga setempat terkait fasilitas yang harus direalisasikan otoritas berwenang. Hal ini berdampak pada adanya respon yang masif dari Pemerintah Daerah DIY maupun Pusat terhadap kebutuhan komunitas serta lingkungan TPST.

Selain itu pemulung selama ini telah terstigma dengan pekerjaan di lingkungan yang tak layak dan kotor, sehingga dianggap sebagai biang permasalahan (Ramdani, 2018). Walau dari sisi lain sebenarnya mereka sangat berjasa untuk membantu mengurai sampah, yang ternyata dalam 1 tahun bisa berkontribusi dalam mengurangi 4.800 ton debit sampah di TPST Piyungan. (Wawancara dengan Maryono, ketua Mardiko, pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

Hal yang demikian tadi dan ditambah dengan usia TPST Piyungan yang tidak lagi muda, menyebabkan Pemerintah Daerah akan membuat kebijakan pengelolaan TPST

Piyungan pada sektor swasta pada tahun 2024/2025 dengan penutupan secara permanen telah dimulai sejak 16 April 2024, sehingga hal yang demikian itu membuat pemulung haruslah mengubah pola pikirnya menjadi pengusaha sampah. Contoh di beberapa negara, usaha pengolahan sampah menjadi program penting untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDG's), oleh karenanya diperlukan kerja sama dari banyak pihak. (Ramdhani, 2018) Program penguatan ekonomi ini berbentuk program pengembangan usaha pemilahan dan pengolahan sampah. Pemilahan sampah ini mulai diterapkan ke Mardiko mulai tahun 2020, dengan harapan menjadi alternatif setelah penutupan TPST Piyungan.

“MPM bersama pemulung Mardiko sudah memiliki harapan agar nantinya para pemulung dapat alih profesi pasca penutupan TPST menjadi pengusaha olahan sampah, jadi pemulung tidak hanya memungut sampah akan tetapi juga dapat mengumpulkan, memilah dan juga dapat menjualnya. Sampah organik diolah menjadi budidaya maggot dan juga dapat pula menjadi bahan pupuk, adapun sampah anorganik dapat diolah agar mempunyai potensi usaha yang memungkinkan. Pasca penutupan TPST nantinya pemulung Mardiko akan tetap melakukan pemilahan sampah skala kecil dengan dibantu usaha pemilahan sampah dari MPM dan LazisMu PP. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan dan melatih sumber daya manusianya. Sebenarnya kemarin sudah tahap uji coba tetapi masih ada beberapa hambatan seperti belum adanya pasokan sampah yang bisa dipilah.” (Wawancara Sanupal, anggota divisi Pemberdayaan Komunitas MPM, tanggal 10 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB)

Alur unit usaha ini yang pertama adalah sampah masuk ke rumah produksi usaha, kemudian sampah dipilah oleh pemulung yang bertugas sebagai operator. Sampah yang telah dipilah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: a) organik, yang dapat berguna bagi pembuatan pupuk kompos dan bahan pakan budidaya maggot; b) anorganik sebagai sampah daur ulang yang dapat dibuat kerajinan maupun lainnya dan berharga jual; c) residu, sampah residu ini dapat digunakan untuk bahan pembuatan paving block.



Gambar 1: Menggali Potensi Pemulung Melalui Pemilahan Sampah

Program ini hingga sekarang sedang berlangsung, dan Mardiko mampu mengolah sampah sekitar 4 ton/hari sampah rumah tangga, sampah pasar dan lain-lain. Program ini pada awalnya merupakan tahap awal dari usaha pengolahan sampah dari usaha pengolahan sampah yang berfokus pada pengolahan primer (pemilahan sampah anorganik layak jual, organik dan sedikit residu). Saat terjadi permasalahan sampah di Yogyakarta karena TPST ditutup sementara selama 1 bulan, Mardiko mampu memberi kontribusi terhadap penyelesaian sampah dan mampu bertransisi dari pemulung ke pengusaha atau pengolah sampah dengan jumlah pekerja 5 hingga 8 orang. Harapannya usaha ini dapat terus dikembangkan dan memperkerjakan pemulung dengan tempat, upah, keselamatan dan pengakuan sosial yang lebih massif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini melalui observasi, wawancara, data di MPM PP Muhammadiyah maupun studi dokumentasi mengenai pemberdayaan dan partisipasi pemulung di TPST Piyungan adalah sebagai berikut: Pengorganisasian pemulung: seperti yang sering kali diungkapkan dalam penelitian ini, yang pertama kali dilakukan MPM adalah pengorganisasian pemulung dengan cara membentuk komunitas pemulung Mardiko (Makaryo Adhi Ngayogyakarta). Sebelum adanya komunitas ini, pemulung tidak terorganisir dalam satu wadah, lebih cenderung berkelompok mengikuti pengepul masing-masing, dengan dibentuknya komunitas ini selain semakin memudahkan pemulung untuk mengeluarkan potensi diri ternyata juga memudahkan pula pemulung dalam rangka menerima program pemberdayaan maupun dalam melakukan advokasi terhadap pengelola TPST maupun ke Pemerintah Daerah.

Adanya kesempatan, peluang dan pelatihan: kesempatan, peluang dan pelatihan yang diterima oleh pemulung TPST Piyungan bermula saat MPM pertama kali melakukan program pemberdayaan pada tahun 2016. Pada 2016 realisasi kegiatan pemberdayaan di komunitas Mardiko berfokus pada pembenahan dan peningkatan kesehatan pemulung melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diimplementasikan secara lebih detail dan mendalam dengan diadakannya penyuluhan rutin tentang PHBS. Peluang tindak lanjut ini juga diiringi pengecekan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dan RS PKU Muhammadiyah. Pelatihan ini selanjutnya juga terkait dengan penguatan internal Mardiko berupa pertemuan rutin, pengajian inspirasi Ahad pagi yang rutin dilaksanakan dua bulanan, pelatihan teknologi informasi bagi pengurus, pembuatan tanda pengenalan dalam rangka pendataan anggota, edukasi keuangan bagi anggota

Mardiko, serta edukasi tentang koperasi,

MPM PP Muhammadiyah juga bersama Mardiko membangun fasilitas dan sarana akses air bersih, seperti padasan Mardiko di dekat tumpukan sampah TPST Piyungan maupun membangun rumah pemilahan sampah. Adanya banyak program ini kemudian menimbulkan banyak dilakukannya pelatihan-pelatihan soft skill bagi pemulung. Pelatihan ini selain menunjang jalannya organisasi Mardiko seperti pelatihan informasi teknologi, pengajian Ahad Pagi maupun pelatihan pemilahan sampah juga harapannya dapat meningkatnya kemampuan pemulung itu sendiri. Banyaknya program, pelatihan inilah yang menyebabkan potensi pemulung menjadi terwadahi dan tersalurkan.

Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat: Pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged) agar dapat berdaya. Program pemberdayaan ini dapat berjalan terutama disebabkan karena adanya keterlibatan dari pemulung dan masyarakat di sekitar TPST Piyungan. Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi tenaga, keterampilan, maupun partisipasi pikiran. Selain itu partisipasi waktu, tenaga, keterampilan, maupun partisipasi pikiran misalnya saat tahapan pengorganisasian dan saat implementasi program. Beberapa program kegiatan yang telah berjalan selama ini selalu dihadiri oleh pemulung maupun keluarganya seperti pemeriksaan kesehatan, pelatihan teknologi informasi, usaha pemilahan sampah, edukasi keuangan bagi anggota Mardiko maupun pengajian inspirasi Ahad pagi.

Adanya perubahan perilaku pada pemulung: perubahan perilaku ini terutama pada perilaku hidup bersih dan sehat, dengan adanya bak cuci tangan, pemulung jadi terbiasa untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas memulung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, R. (2017). *Pengelolaan Sampah TPST Piyungan : Potret Kondisi Persampahan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Pengelolaan Lingkungan Blok 2 TA 2017/2018*
- Asmuni, A. (2017). *Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2(1).*
- Endah, K. (2020). *Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 135-143.*
- Farid, M.R. *Derap Langkah Pemuda sebagai Fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)*

Piyungan.

- Febriyanti, M. P., Hendrijanto, K., & Poerwanti, S. D. (2023). Empowering the Community or Corporate Image Building?: Analysis of Rengganis Agro Tourism (WAR) in Gunung Gambir Area by PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12(2). <https://doi.org/10.14421/welfare.2023.122-04>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat.*
- Huda Miftachul, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial SEBUAH PENGANTAR Edi Suharto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Marwansyah, G. A. (2018). "Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan Sampah Oleh Sektor Informal di TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta."
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat. Global Eksekutif Teknologi.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47.* Yogyakarta: Gramasurya
- Ramdani, Febri. 2018. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Muhammadiyah (Studi Kasus di TPST Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Suharto Edi, 2005 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat,* (Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama.